

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
XIX		URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
		1. KEBIJAKAN					
		Kebijakan Teknis Bidang komunikasi dan Informatika	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Kebijakan c. Perumusan dan penyusunan bahan d. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan e. Penetapan berbentuk NSPK 					
		Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> a. Teknik Pos dan Telekomunikasi b. Teknik Komunikasi Radio c. Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi d. Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar e. Standar dan Audit Perangkat Lunak 					
		2. SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA					
		A. Penataan Sumber Daya					
		1. Alokasi Spektrum Dinas	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi Dinas Tetap - Alokasi Dinas Bergerak Darat 					

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat <ul style="list-style-type: none"> - Alokasi Dinas Penyiaran - Alokasi Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		3. Orbit Satelit <ul style="list-style-type: none"> - Notifikasi dan Penataan Filling Satelit - Tata Kelola Hubungan antar penyelenggara 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		4. Ekonomi Sumber Daya <ul style="list-style-type: none"> - Analisa Industri dan Ekonomi - Penanganan izin pita 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		5. Harmonisasi Teknik Spektrum <ul style="list-style-type: none"> - Teknik Spektrum antar lembaga - Harmonisasi dan Notifikasi Terrestrial 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		B. Operasi Sumber Daya					
		1. Pelayanan Spektrum Dinas <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Dinas Tetap - Pelayanan Dinas Bergerak Darat 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		2. Pelayanan Spektrum Non Dinas <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Dinas Penyiaran 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Dinas Penerbangan, Maritim, dan Satelit 					
		3. Sertifikasi Operator Radio <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio antar penduduk - Pelayanan Operator Radio 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		4. Penanganan Biaya <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio - Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		5. Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya <ul style="list-style-type: none"> - Konsultansi dan Informasi Sumber Daya - Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		C. Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika					

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>1. Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rancang Bangun Teknologi Monitoring Spektrum - Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Spektrum 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<p>2. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Spektrum - Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<p>3. Monitoring dan Penerbitan Spektrum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Penerbitan Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan Bergerak Terestial - Monitoring dan Penerbitan Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap dan Bergerak Terestial 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>4. Monitoring dan Penerbitan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika - Penerbitan Standar Perangkat Pos dan Informatika <p>3. PENYELENGGARAAN INFORMATIKA</p> <p>A. Telekomunikasi</p> <p>1. Layanan Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses - Backbone <p>2. Layanan Jasa Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi Elektronik - Jasa Multimedia <p>3. Penomoran Telekomunikasi dan Informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penomoran Telekomunikasi - Penomoran Informatika <p>4. Tarif dan Interkoneksi</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - Tarif Telekomunikasi - Interkoneksi Telekomunikasi 					
		5. Kelayakan Sistem Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan Sistem Jaringan dan Jasa - Penerapan Teknologi Telekomunikasi 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		B. Penyiaran <ul style="list-style-type: none"> - Kelayakan Sistem Jaringan dan Jasa - Penerapan Teknologi Telekomunikasi 					
		1. Pemetaan dan Database <ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi - Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		2. Verifikasi dan Ujicoba Siaran <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio - Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		3. Radio <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio - Lembaga Penyiaran Swasta Radio 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		4. Televisi <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Asing televisi - Lembaga Penyiaran Swasta Televisi 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Iklim Usaha Penyiaran <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Penyiaran - Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran C. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		1. Telekomunikasi Khusus Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> - Analisa Penyelenggaraan - Pelayanan 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		2. Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> - Analisa Penyelenggaraan - Pelayanan 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		3. Layanan Khusus Penyiaran <ul style="list-style-type: none"> - Publik Radio - Publik Televisi 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		4. Pelayanan Kewajiban Universal <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Pembangunan - Monitoring dan Evaluasi 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		5. Pengembangan Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Instruktur 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>- Analisa Ekonomis Infrastruktur</p> <p>D. Pengendalian Pos dan Informatika</p> <p>1. Monitoring dan Evaluasi Pos</p> <p>- Monitoring</p> <p>- Evaluasi</p> <p>2. Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi</p> <p>- Monitoring</p> <p>- Evaluasi</p> <p>3. Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi</p> <p>- Monitoring</p> <p>- Evaluasi</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>4. Monitoring dan Evaluasi Penyiaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring - Evaluasi <p>5. Pencegahan dan Penertiban</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan - Penertiban <p>4. APLIKASI INFORMATIKA</p> <p>A. e-Government</p> <p>1. Tata Kelola e-Government</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program e-Government - Evaluasi e-Government 	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>2. Teknologi dan Infrastruktur e-Government</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknologi e-Government - Infrastruktur e-Government 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<p>3. Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interoperabilitas e-Business - Interkonektivitas e-Bussiness 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<p>4. Aplikasi Layanan Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi Layanan Pemerintahan Pusat - Aplikasi Layanan Pemerintahan Daerah 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Aplikasi Layanan Publik <ul style="list-style-type: none"> - Inisiasi Aplikasi Layanan Publik - Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik B. e- Business	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		1. Tata Kelola e-Business <ul style="list-style-type: none"> - Program e-Business - Evaluasi e-Business 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		2. Teknologi dan Infrastuktur e-Business <ul style="list-style-type: none"> - Teknologi e-Business - Infrastruktur e-Business 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		3. Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business <ul style="list-style-type: none"> - Interoperabilitas e-Business - Interkonektivitas e-Bussiness 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		4. Aplikasi Layanan e-Business <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Usaha Kecil dan Mikro - Bidang Usaha Menengah dan Besar C. Pemberdayaan Informatika	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>1. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan</p> <p>- Perancangan Model</p> <p>- Penerapan Model</p> <p>2. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan</p> <p>- Pengembangan Model</p> <p>- Penerapan Model</p> <p>3. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar</p> <p>- Pengembangan Model</p> <p>- Penerapan Model</p> <p>D. Pemberdayaan Industri Informatika</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan - Promosi 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		2. Industri Perangkat Informatika Pengguna <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan - Pengembangan Produk 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		3. Industri Perangkat Lunak <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan - Pengembangan Produk 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		4. Industri Konten Multi media <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan - Pengembangan Produk 	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		E. Keamanan Informasi					

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>1. Tata kelola keamanan informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan - Manajemen Resiko 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum</p>	Unit Pengolah Terkait
		<p>2. Teknologi Keamanan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur - Aplikasi 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum</p>	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>3. Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur - Aplikasi 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum</p>	Unit Pengolah Terkait
		<p>4. Penyidikan dan Penindakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan Evaluasi keamanan informasi - Tanggap darurat peristiwa keamanan informasi 	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum</p>	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>5. Budaya Keamanan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyidikan - Penindakan <p>5. INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</p> <p>A. Komunikasi Publik</p> <p>1. Tata Kelola Komunikasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Komunikasi Publik - Monitoring dan Evaluasi <p>2. Pengelolaan Opini Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Opini Publik - Pengolahan Opini Publik 	<p>Rahasia</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Tertutup</p> <p>tertutup</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Layanan Komunikasi Publik <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Data - Pengolahan Data B. Pengolahan dan penyediaan informasi 1. Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan <ul style="list-style-type: none"> - Politik dan Kemanan - Hukum dan Hak Asasi manusia 2. Informasi Perekonomian <ul style="list-style-type: none"> - Keuangan, Perbankan, dan Jasa - Industri dan Perdagangan 3. Informasi Kesejahteraan Rakyat <ul style="list-style-type: none"> - Agama, Sosial, dan Budaya - Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup C. Pengelolaan Media Publik 1. Media Cetak 2. Media Online	Biasa/terbuka Biasa/terbuka Biasa/terbuka Biasa/terbuka Terbatas	Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka tertutup	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>3. Media Luar Ruang dan Audio Visual</p> <p>D. Kemitraan Komunikasi</p> <p>1. Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara - Monitoring dan Evaluasi <p>2. Kemitraan Media dan Dunia Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha - Monitoring dan Evaluasi <p>3. Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi - Monitoring dan Evaluasi <p>6. PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA</p> <p>A. Infrastruktur Informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan - Piranti Teknologi Informatika - Keamanan Informatika 	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>B. Sistem dan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Portal dan Konten - Pengumpulan dan Pengolahan Data - Pengembangan Aplikasi <p>C. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat</p> <p>1. Pelayanan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Media Baru - Media Konvensional - Dokumentasi dan Perpustakaan <p>2. Hubungan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publikasi - Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik - Hubungan Internal dan Eksternal <p>3. Bimbingan Teknis</p> <p>Bimbingan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana Informatika, Informasi dan Humas</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>4. Evaluasi</p> <p>Evaluasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana Informatika, Informasi dan Humas</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait